

BAB 5

KESIMPULAN

Dalam bab terakhir ini akan disampaikan tentang kesimpulan yang berisi ringkasan dari keseluruhan uraian pada bab-bab terdahulu. Selanjutnya, dalam kesimpulan ini juga akan dipaparkan implikasi teoretis dan implikasi praktis atas pelaksanaan hubungan Cina-AS tersebut dengan maksud agar kesimpulan ini dapat lebih memudahkan untuk memperoleh pemahaman atas isi penulisan sebagai berikut.

5.1 Ringkasan

Dari uraian pada bab-bab terdahulu dapat diperoleh gambaran tentang hubungan antara Cina dan AS sejak normalisasi hubungan diplomatik pada tanggal 1 Januari 1979. Cina dan AS sepakat untuk saling mengakui satu sama lain dan membina hubungan diplomatik. Cina dan AS sepakat untuk mengurangi bahaya konflik internasional. AS mengakui bahwa Cina adalah wakil pemerintahan yang sah dan Taiwan adalah bagiannya. Kedua negara meyakini bahwa normalisasi hubungan Cina-AS tidak hanya merupakan kepentingan kedua belah pihak semata, melainkan juga dapat berkontribusi terhadap perdamaian dunia. Dalam dekade pertama sejak dibuka hubungan diplomatik, hubungan kedua negara berjalan dengan baik dan stabil serta program kerjasama dan pertukaran bilateral di berbagai bidang meningkat, meskipun tidak jarang dihadapkan kepada kondisi yang sulit dalam masalah Taiwan maupun isu-isu lain.

Cina dan AS menyadari bahwa meskipun terdapat banyak perbedaan, terutama perbedaan dalam bidang keamanan yang berkaitan dengan peningkatan eskalasi kekuatan militer kedua negara, namun kedua negara juga memiliki banyak persamaan kepentingan dan memiliki landasan yang luas untuk mengembangkan kerjasama. Sejak berakhirnya Perang Dingin, masalah-masalah yang menyangkut kepentingan bersama antara Cina dengan AS makin meningkat dan bidang garapan untuk mengembangkan kerjasama, terutama kerjasama dalam bidang politik, ekonomi, dan perdagangan makin meluas. Penting bagi kedua belah pihak untuk berpikir dalam jangka panjang dan melihat hubungan dengan gambaran yang lebih luas.

Cina dan AS merupakan aktor penting dan mempunyai pengaruh kuat dalam percaturan internasional, sehingga harus memikul tanggung jawab yang besar untuk ikut menciptakan dunia yang damai untuk pembangunan umat manusia. Hubungan Cina-AS yang baik tidak hanya memberi manfaat kepada rakyat kedua negara, tetapi dapat memberikan sumbangan kepada pembangunan, perdamaian, dan stabilitas dunia. Hubungan Cina-AS tidak murni merupakan hubungan bilateral karena pengaruhnya jauh di luar batasan bilateral, sehingga kedua belah pihak dalam merumuskan hubungan bilateral tidak terpaku pada batasan-batasan isu bilateral tetapi harus dalam gambaran yang lebih luas yang memiliki implikasi regional maupun internasional. Cina dan AS telah mengembangkan sikap yang konstruktif dengan mengedepankan prinsip-prinsip saling menguntungkan dan mendapatkan manfaat bersama.

Seiring perubahan waktu, dimensi-dimensi baru selalu muncul dan memberi warna dalam hubungan Cina-AS. Dalam dunia saat ini, proses globalisasi berjalan dengan makin cepat, saling ketergantungan yang makin dalam, isu-isu global yang makin mengemuka dan makin nyata, serta hubungan antara negara tidak lagi didasarkan kepada rumusan *zero-sum game*. Hubungan yang harmonis akan memberikan manfaat, sedangkan pertentangan tidak akan pernah menguntungkan siapapun. Penting bagi Cina untuk membina hubungan baik dengan AS, demikian pula sebaliknya. Hubungan baik antara Cina dengan AS akan meningkatkan keyakinan terhadap terpeliharanya stabilitas dan perdamaian dunia. Kondisi itu diperlukan agar kedua negara tersebut dapat memusatkan perhatian kepada pembangunan dan pertumbuhan ekonomi untuk menopang kesejahteraan masyarakatnya. Sejalan dengan pesatnya kemajuan ekonomi Cina, AS merupakan pasar besar bagi barang-barang produk Cina. Selain itu, AS juga dapat merupakan sumber modal, teknologi, dan manajemen untuk menutup kekurangan Cina dalam mewujudkan Cina modern dan kuat. *Grand strategy* yang dirancang kedua negara telah dapat menciptakan peluang yang kondusif dalam melakukan pendekatan untuk membina hubungan baik antara Cina dan AS, yakni melalui pengembangan *strategic partnership* Cina-AS dalam upaya untuk mewujudkan kepentingan bersama.

Kemajuan ekonomi Cina terjadi dimulai dari pelaksanaan reformasi ekonomi di negara Tirai Bambu tersebut sejak tahun 1978 hingga saat ini. Perekonomian Cina yang semula tertutup dengan menganut sistem ekonomi yang bercorak sosialis telah direformasi dan diganti dengan perekonomian pasar terbuka berdasarkan sistem ekonomi kapitalisme. Reformasi ekonomi telah membawa Cina pada peningkatan pertumbuhan ekonomi, terlebih setelah Cina pada tahun 2001 diterima dan berperan aktif dalam WTO bersama-sama dengan negara-negara lain, terutama AS. Aktivitas Cina dan AS dalam forum WTO telah meningkatkan volume hubungan ekonomi dan perdagangan Cina-AS dari tahun ke tahun, yang ditandai dengan meningkatnya arus modal, barang, dan teknologi di antara kedua negara. Selama kurun waktu sejak Cina menjadi anggota WTO hingga saat ini, hubungan Cina-AS menjadi saling menguntungkan untuk kepentingan kedua negara. Dengan kata lain, kemajuan ekonomi yang terjadi di Cina, terlebih setelah negara ini menjadi anggota WTO dan melakukan hubungan ekonomi perdagangan dengan AS telah membawa peningkatan kepentingan timbal balik pada kedua negara dari waktu ke waktu. Meningkatnya kepentingan timbal balik Cina-AS menuntut keharusan kedua negara untuk selalu mengembangkan hubungan kerjasama, baik di bidang politik, ekonomi, maupun perdagangan. Pengembangan hubungan kerjasama Cina-AS tersebut terjadi secara signifikan, sehingga masing-masing negara merasa saling membutuhkan, bahkan merasa saling ketergantungan.

Hubungan saling membutuhkan dan saling ketergantungan antara Cina-AS tersebut antara lain nampak dari kenyataan bahwa pembangunan ekonomi Cina sangat tergantung pada arus modal dan teknologi dari AS. Demikian pula terdapat suatu kenyataan yang lain bahwa peningkatan arus ekspor barang perdagangan dari Cina sangat tergantung dari luasnya permintaan pasar domestik di AS. Hal demikian nampak jelas sewaktu terjadi krisis ekonomi global tahun 2008 yang bermula dari terjadinya krisis finansial di AS. Terjadinya krisis finansial di AS yang berimbas pada terjadinya krisis ekonomi global tersebut telah menghambat laju pertumbuhan ekonomi Cina sebagai akibat dari melemahnya permintaan pasar domestik di AS, yang memaksa Cina mengurangi ekspor perdagangannya ke AS.

Dengan kata lain, produksi barang-barang Cina sangat tergantung pada luasnya permintaan pasar domestik di AS. Sementara itu, AS juga membutuhkan barang-barang ekspor dari Cina dengan harga yang relatif murah. Selain itu, AS juga berkepentingan untuk meningkatkan penanaman modalnya di Cina dengan memperluas pertumbuhan dan perkembangan MNC asal AS di Cina sebagai akibat dari rendahnya tingkat upah buruh di negara Tirai Bambu tersebut.

Krisis finansial di AS yang merembet pada terjadinya krisis finansial global tahun 2008 telah berdampak negatif ke hampir seluruh dunia. Hampir semua negara mengalami penurunan tingkat perekonomiannya, tidak terkecuali Cina. Negara ini mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi yang semula rata-rata di atas 9 persen menjadi rata-rata di bawah 9 persen pertahun. Oleh karena itu, untuk pemulihan ekonominya, masing-masing negara, terlebih lagi Cina, sangat mengharapkan terjadinya pemulihan ekonomi AS yang akan berdampak pada pemulihan ekonomi global. Dalam kaitan ini, Cina sebagai negara yang mempunyai cadangan devisa terbesar di dunia dalam standar dolar AS sangat berkepentingan terhadap pulihnya ekonomi dan pulihnya nilai dolar AS dalam perdagangan dunia. Mengingat hal demikian, AS pun sangat berkepentingan agar semua negara, terlebih Cina, dapat meningkatkan peran aktifnya dalam penanggulangan krisis perekonomian global dimaksud. Hal ini nampak antara lain pada upaya dari beberapa negara yang mewakili negara-negara maju yang dimotori oleh AS bersama dengan negara-negara berkembang yang didukung oleh Cina, melakukan upaya bersama-sama dalam penanggulangan dampak krisis ekonomi global dimaksud melalui pertemuan kelompok negara-negara G-20 di Pittsburgh, AS, pada bulan September 2009.

Uraian di atas menunjukkan bahwa dalam era globalisasi seperti saat ini, perekonomian suatu negara tidak dapat dilepaskan dari perekonomian negara lain sehingga menuntut masing-masing negara untuk melakukan kerjasama ekonomi dengan negara lain. Demikian juga dengan Cina dan AS yang merupakan dua raksasa ekonomi terbesar dunia saat ini tidak dapat dilepaskan hubungannya satu terhadap yang lain, bahkan masing-masing negara saling tergantung satu terhadap yang lain.

Saling ketergantungan kedua negara terjadi terlebih sejak kedua negara ini menjalin hubungan yang lebih luas dalam bidang politik, ekonomi, maupun perdagangan dalam kerangka PBB, WTO, APEC, G-20, G-2, dan lain-lain. Hubungan kedua negara yang sedemikian membuktikan bahwa pelaksanaan hubungan luar negeri Cina-AS, terutama sejak keanggotaan Cina dalam WTO hingga saat ini, adalah sejalan dengan aplikasi teori liberalisme interdependensi maupun liberalisme institusional yang dikemukakan oleh Robert Keohane (1989). Berdasarkan pendekatan teori liberalisme yang dikemukakan oleh Robert Keohane di atas, secara singkat, fenomena pelaksanaan hubungan kerjasama Cina-AS dapat digambarkan oleh penulis seperti terlihat pada tabel di bawah ini.

Bidang	Tataran	Forum/Institusi	Sifat	Tujuan
Politik	Bilateral	PBB	Independent	Kedaulatan
	Global		Independent	Kedaulatan
Ekonomi	Bilateral	G-2	Interdependent	Kesejahteraan
	Regional	APEC	Independent	Kesejahteraan
	Multilateral	G-20	Interdependent	Kesejahteraan
	Global	PBB	Independent	Kesejahteraan
Perdagangan	Bilateral	G-2	Interdependent	Keuntungan
	Global	WTO	Interdependent	Keuntungan

5.2 Implikasi Teoretis

Pelaksanaan hubungan luar negeri Cina-AS sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Keohane seperti tersebut di atas memberikan pemahaman bahwa ketika terdapat derajat interdependensi yang tinggi antara negara-negara, seperti Cina dan AS, maka negara-negara tersebut akan memanfaatkan institusi-institusi internasional formal yang ada untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi secara bersama-sama. Dalam hal ini, institusi-institusi internasional tersebut berperan sebagai badan yang memajukan kerjasama antar negara (Cina-AS) melalui pembuatan kesepakatan dalam menghadapi isu-isu ekonomi dan perdagangan secara bersama-sama.

Dengan kesepakatan bersama antar negara tersebut, institusi-institusi internasional dalam hal ini berposisi sebagai mediator sehingga timbulnya konflik antar negara sebagai akibat dari struktur sistem internasional yang bersifat anarki dapat dihindarkan. Dalam hal ini, institusi-institusi internasional tidak lagi memandang hubungan antar negara sebagai *zero-sum game*, melainkan *variable zero-sum game* untuk mendapatkan keuntungan bersama. Dalam konteks hubungan ekonomi dan perdagangan Cina-AS, institusi-institusi internasional yang ada, seperti WTO, merupakan suatu lembaga dan pola kerjasama antar negara dengan struktur organisasi yang memadai guna mengupayakan tercapainya tujuan bersama, baik antar aktor negara maupun aktor non-negara secara berkesinambungan.

Pelaksanaan hubungan luar negeri Cina-AS berdasarkan pendekatan teori liberalisme interdependensi dan liberalisme institusional yang dikemukakan oleh Keohane tersebut di atas mempunyai berbagai implikasi yang bersifat teoretis. Dalam hal ini, penulis sependapat dengan kajian yang disampaikan oleh Avery Goldstein, Quansheng Zao dan Guo Liu, serta Zbigniew Brzezinski sebagai berikut.

Pertama, menurut Goldstein (2007) bahwa institusi internasional (WTO) dapat mengurangi kondisi anarki dan mengupayakan pemenuhan kepentingan nasional negara-negara melalui kerjasama. Melalui institusi internasional (WTO), dampak potensial yang mengganggu hubungan Cina dan AS selaku *rising power* dalam memenuhi keuntungan relatif masing-masing negara dapat dielakkan sehingga dapat menghindari konflik karena memungkinkan terjadinya kerjasama secara timbal-balik meskipun dalam kondisi internasional yang anarki. Dalam konteks hubungan dengan AS, Cina tidak perlu melakukan konflik dalam hubungan internasional. Sebagai anggota WTO, Cina dapat mendapatkan keuntungan dalam hubungan ekonomi dan perdagangan dengan AS melalui kerjasama. Dengan demikian, Cina akan tetap berintegrasi dengan institusi-institusi internasional yang dipimpin oleh AS. Perolehan keuntungan dari perdagangan bebas dan investasi dapat memotivasi Cina untuk meningkatkan hubungan kerjasama dengan AS.

Kondisi demikian selanjutnya akan menyediakan landasan optimisme terkait dengan prospek perdamaian di Selat Taiwan dengan pertimbangan, antara lain yakni bahwa (1) keanggotaan Cina dalam institusi-institusi internasional (PBB, WTO, dan APEC) akan memperkuat kepentingan politik domestiknya untuk menghindari cara penyelesaian melalui kekerasan dalam masalah Taiwan, (2) bahwa penggunaan kesabaran dibandingkan kekerasan yang dilakukan oleh Cina dapat membantu dan berdampak untuk mengurangi keinginan Taiwan untuk merdeka, dan (3) meskipun AS berkepentingan membantu Taiwan dalam hal terjadi kekerasan yang dilakukan oleh Cina, AS juga mengingatkan Taiwan bahwa AS tidak akan terjebak secara langsung dalam konflik yang diakibatkan oleh kenekatan Taiwan untuk memerdekakan diri dari Cina sejalan dengan prinsip *One China Policy* yang dianut oleh AS.

Kedua, menurut penjelasan yang disampaikan oleh Quansheng Zhao, Guoli Liu, dan Zbigniew Brzezinski (2007) bahwa dalam hubungan Cina-AS, Cina cenderung untuk menghindari konflik militer dengan AS dan akan lebih fokus pada pembangunan ekonomi. Dalam hal hubungan Cina-AS, AS adalah satu-satunya kekuatan global, sementara Cina masih merupakan kekuatan regional. Atas hal tersebut, Cina akan menempuh kebijakan bertetangga baik dan bertanggung jawab seperti dalam penyelenggaraan *Six Party Talks*, yang membahas krisis nuklir Korea Utara maupun keterlibatan Cina dalam kerjasama regional melalui APEC.

Menurut hemat penulis, terjadinya kemajuan ekonomi Cina dan meningkatnya hubungan kerjasama dalam bidang politik, ekonomi, dan perdagangan Cina-AS dalam berbagai institusi internasional mempunyai implikasi teoretis dalam hubungan internasional. Semakin menguatnya perspektif liberalisme semakin berkurang relevansi perspektif realisme dalam memahami hubungan Cina-AS. Kondisi demikian memunculkan suatu harapan bahwa sifat anarki dalam hubungan internasional akan semakin menurun, maka penyelesaian perbedaan pandangan yang ada melalui perang bukanlah merupakan solusi yang rasional. Terutama yang berkaitan dengan kekhawatiran adanya ancaman kekuatan militer Cina terhadap AS maupun sebaliknya AS terhadap Cina.

5.3 Implikasi Praktis

Implikasi teoretis sebagaimana dikemukakan di atas, selanjutnya memunculkan implikasi praktis pada pelaksanaan hubungan Cina-AS sebagai berikut (1) menurunnya kemungkinan terjadinya konflik dan anarki dalam hubungan Cina-AS, (2) terciptanya peluang yang lebih luas untuk membangun hubungan kerjasama yang lebih konstruktif, baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial, dan lain-lain demi pemenuhan kepentingan bersama, (3) terbangunnya citra yang lebih baik bagi Cina maupun AS di mata internasional, (4) meningkatnya kepercayaan negara-negara lain pada kepemimpinan Cina dan AS di kancah internasional, dan (5) terjalannya kerjasama yang lebih baik dan terwujudnya perdamaian antara Cina-AS dalam tataran bilateral, yang berkontribusi pada terwujudnya stabilitas ekonomi dan politik dalam tataran regional maupun global.

Terkait dengan implikasi praktis tersebut, akhirnya sebagai penutup, penulis mengharapkan agar pada era globalisasi di saat negara-negara di dunia menjadi saling bergantung satu sama lain, perlu dibangun hubungan kerjasama yang lebih baik dan saling menguntungkan melalui berbagai lembaga internasional sejalan dengan perspektif liberalisme dalam hubungan internasional demi terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh masyarakat menuju terwujudnya perdamaian dunia yang lebih langgeng. Semoga!